

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman saya, kadang tidak semua konsep yang dirumuskan berjalan sesuai rencana di lapangan. Ada sejumlah kendala, kebanyakan bersifat politis, yang membuat konsep pengembangan *merit system* dalam proses pengkaderan di partai menghadapi tantangan tersendiri yang harus direnungkan dalam hal ini.

Pertama, mekanisme dan pola rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD) Partai Golkar melakukan rekrutmen calon anggota legislatif dikhususkan terhadap internal partai, tetapi ada kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk memperbolehkan rekrutmen eksternal partai dengan berbagai pertimbangan dan harus disetujui oleh DPP. Partai Golkar sudah memiliki kader banyak yang mengedepankan karir politik di partai dalam perekrutannya.

Kedua, Walaupun sudah memiliki acuan rekrutmen yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sudah cukup bagus tetapi dalam praktek rekrutmen caleg DPRD Kabupaten Kota yang dilakukan DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara peran pimpinan partai sangat dominan. Hal ini menyebabkan seleksi terhadap bakal caleg bersifat tertutup yang memungkinkan aspek subyektifitas pimpinan bermain didalamnya.

Ketiga, Kriteria khusus yang diprioritaskan Partai Golkar adalah aspek pengabdian, dan prestasi selama menjadi anggota maupun pengurus partai. Aspek

pendidikan formal menjadi aspek yang memiliki bobot penilaian terkecil dalam seleksi bacaleg (Bakal calon Legislatif).

Keempat, Dalam pelaksanaannya partai Golkar menemui berbagai kendala. Umumnya kendala yang dihadapi menyangkut masalah administrasi dan kesulitan memenuhi kuota 30 % perempuan. Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran organisasi sayap seperti Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG). Namun hasilnya belum maksimal karena masih dipengaruhi dominasi pimpinan partai.

5.2 Saran

Pertama, Partai Golkar harus melakukan program-program riil yang bermanfaat masyarakat agar bisa menarik perhatian masyarakat.

Kedua, Golkar harus melakukan pengkaderan yang baik sebagai upaya untuk mempersiapkan kader yang baik dalam tubuh partai, serta tidak memunculkan bacaleg yang instan.

Ketiga, Harus melibatkan unsur masyarakat untuk mengawasi jalannya seleksi agar lebih transparan dan meminimalisir aspek subyektifitas pimpinan partai.

Keempat, Harus memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dalam kepengurusan dan mengoptimalkan organisasi sayap perempuannya.